

**PERAN KEJAKSAAN NEGERI KUDUS DALAM UPAYA
PENGEMBALIAN ASET NEGARA HASIL TINDAK
PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Disusun untuk Melengkapi Persyaratan Menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum
Dengan Kekhususan Hukum pidana



**Disusun oleh:
MALIM MAOLANA
NIM. 2007-20-032**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
2014**

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN KEJAKSAAN NEGERI KUDUS DALAM UPAYA
PENGEMBALIAN ASET NEGARA HASIL
TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Pendidikan Program Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum
Dengan Kekhususan Hukum Pidana

Disusun oleh:

MALIM MAOLANA

NIM. 2007-20-032

Kudus, September 2013

Disetujui:

Pembimbing I

Henny Susilowati, S.H., M.H

Pembimbing II

Suyono, S.H., M.H

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muria Kudus



Ristamadji, S.H., M.Hum

PERNYATAAN PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MALIM MAOLANA

Nim : 2007-20-032

Judul Skripsi : PERAN KEJAKSAAN NEGERI KUDUS DALAM UPAYA
PENGEMBALIAN ASET NEGARA HASIL TINDAK PIDANA
KORUPSI

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 13 September 2013



nembuat pernyataan,

(MALIM MAOLANA)

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan.

(Khalifah Ali bin Abi Talib)

Setiap orang di dunia ini adalah seorang tamu, dan uangnya adalah pinjaman. Tamu itu pastilah akan pergi, cepat atau lambat, dan pinjaman itu haruslah dikembalikan.

(Ibnu Mas'ud)

Kupersembahkan untuk ;

1. Kedua orangtuaku tercinta
2. Istri tercinta
3. Adikku tercinta
4. Sahabat-sahabatku semua
5. Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “PERAN KEJAKSAAN NEGERI KUDUS DALAM UPAYA PENGEMBALIAN ASET NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI”

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Studi Program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Ristamadji, S.H, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Ibu Henny Susilowati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I, yang membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan.
3. Bapak Suyoto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II, yang membimbing sehingga penulisan skripsi ini tersusun dengan baik.
4. Dosen penguji dan semua Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah membantu penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
5. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 13 September 2013

Penulis

ABSTRAKSI SKRIPSI

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Peranan Kejaksaan dalam penanganan dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 lb Undang=undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Proses penanganan dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi tidak hanya bisa dilakukan melalui proses pidana saj4 tapi juga bisa dilakukan dengan gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 32, Pasal 33 undang-undang Nomor 31 rahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan tugas dan wewenang kejaksaan diatur dalam Pasal 30 ayat (1), (2) dan ayat (3) undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia. Proses penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan adalah melakukan pendataan harta benda yang diduga dari korupsi, penyitaan dan penuntutan di pengadilan serta pelelangan harta benda milik terpidana dan atau ahli warisnya. Adapun proses pengembalian kerugian negaradari terpidana dilakukan setelah putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan cara memanggil pihak terpidana dan atau ahli warisnya untuk membicarakan pembayaran uang pengganti akibat korupsi yang ainmtan terpidan4 dan setelah uang pengganti tersebut dibayarkan oieh terpidana kepada Kejaksaan, maka uang tersebut disetorkan ke kas negara oleh Kejaksaan.

Adapun kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam penanganan dan pengembalian kerugian keuangan negar4 yaitu harta benda yang dikorupsi tidak ditemukan, terpidana tidak mampu unhrk membayar uang pengganti dan harta benda yang dikorupsi tersebut sudah di atas namakan kepada orang lain sehingga Kejaksaan mengalami kendala dalam pengembalian kerugian keuangan negara tersebut. Sehingga kedepan disarankan Kejaksaan untuk membuat prosedur yang baku dalam proses pembayaran uang pengganti dari terpidana dan hendaknya kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat merevisi lagi undang-undang yang ada serta membwa undang-undang tentang pengembalian keuangan negara dengan harapan agar tidak terjadi lagi tunggakan pembayaran uang pengganti oleh terpidana.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.	vi
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Kegunaan Penelitian.....	16
E. Sistematika Penelitian	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kejaksaan	20
B. Pengertian Tindak Pidana.....	22
C. Pengertian Korupsi	26
D. Pengertian Money Laundering	27
E. Pengertian Asset Recovery	28
F. Pengertian Kekayaan atan Keuangan Negara	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	34
B. Spesifikasi Penelitian	34
C. Metode Penentuan Sampel	35
D. Metode Pengumpulan Data	36
1. DataPrimer	36

2. Data Sekunder	37
E. Teknik Analisa Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Cara Kejaksaan Negeri Kudus dalam upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi.....	39
B. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Kejaksaan Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi	58
C. Cara Kejaksaan Dalam Menghadapi Hambatan-Hambatan Yang Dialami Dalam Pengembalian Kerugian Kerrangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi.....	59
1. Penyelesaian tunggakan uang pengganti.....	59
2. Pengembalian asset dalam hal terdakwa meninggal dunia.....	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN